

NILAI BUDAYA SIRI'NA PACCE DAN PERILAKU KORUPSI

Mughny Ilman Wali Rusdi dan Susanti Prasetyaningrum

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang
mughnyilmanwr@gmail.com

Abstract. *Corrupt behavior is one of a behavior forms which aims for giving one benefit and harm the society. Meanwhile, siri'na pacce is a appreciation of South Sulawesi culture value, especially for Bugis, Makassar, Mandar, and Toraja ethnics. Which is adopted for a life guidance. This study aimed to investigate the correlation between siri'na pacce culture value and corrupt behavior. This study employed correlational quantitative research approach and carried out 240 subjects. The finding showed that there was a significant negative correlation between siri'na pacce culture value adopted by the society and corrupt behavior ($r = -0.468$; $p = 0.000 < 0.01$). It implies that, the bigger the siri'na pacce adopted by society, the smaller the corrupt behavior will exist, and vice versa. Siri'na pacce culture value affects corrupt behavior for 21,9% ($r^2 = 0,219$).*

Keywords: *Corrupt behavior, culture value, siri'na pace*

Abstrak. Perilaku korupsi merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat. Sedangkan nilai budaya *siri'na pacce* merupakan sebuah bentuk penghayatan dari unsur budaya Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Dimana budaya *siri'na pacce* digunakan sebagai pedoman bagi etnis tersebut dalam menjalankan kehidupannya sehari – hari. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi (hubungan) antara nilai budaya *siri'na pacce* dengan perilaku korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif korelasional dengan subjek sebanyak 240 orang. Hasil penelitian menunjukkan jika ada hubungan negatif yang signifikan antara nilai budaya *siri'na pacce* dengan perilaku korupsi ($r = -0.468$; $p = 0.000 < 0.01$). Jadi, semakin besar nilai budaya *siri'na pacce* yang dianut, maka semakin kecil perilaku korupsi yang akan dimunculkan, begitupun sebaliknya. Nilai budaya *siri'na pacce* mempengaruhi perilaku korupsi sebesar 21,9% ($r^2 = 0,219$).

Kata Kunci: Perilaku korupsi, nilai budaya, *siri'na pacce*

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun kelompok atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas, 2011), korupsi merupakan suatu

fenomena sosial yang bersifat kompleks, sehingga sulit untuk didefinisikan secara tepat ruang lingkupnya.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Transparency International* yang dirilis pada bulan Desember 2014 tentang indeks persepsi korupsi, Indonesia masuk ke dalam peringkat 107. Walaupun naik peringkat dari 114 ke 107, tetapi peringkat tersebut masih jauh di bawah negara – negara tetangga yang ada di kawasan Asia Pasifik. Misalnya, Taiwan masuk peringkat 35, Korea Selatan peringkat 43, dan Filipina dan India sama –

sama berada pada peringkat 85 (voaindonesia.com, 2014).

Sedangkan dalam negeri sendiri dari 33 provinsi yang ada di Indonesia ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,1 triliun dengan temuan 9.703 kasus. Sedangkan 5 provinsi di Indonesia yang dinilai terkorup adalah provinsi DKI Jakarta dengan menghasilkan kerugian negara sebesar Rp 721 miliar di susul provinsi Aceh Rp 669 miliar dan peringkat ketiga provinsi Sumatera Utara Rp. 515 miliar, provinsi Papua Rp 476 miliar, dan Kalimantan Barat Rp 289 miliar. di peringkat 5 terakhir ditempati oleh provinsi Jawa Timur Rp 11 miliar, Jawa Tengah Rp 10 miliar, Bali Rp 6 miliar, DI Yogyakarta Rp 4 miliar dan Bangka Belitung Rp 1,9 miliar (detik.com, 2012).

Sektor-sektor yang terkorup di Indonesia menurut *Indonesian Corruption Watch* atau yang biasa disingkat ICW menyampaikan bahwa empat sektor yang dinilai terkorup adalah sektor politik, parlemen, pengadilan, dan kepolisian. Berdasarkan survei *Global Corruption Barometer* yang telah dilakukan oleh *Transparency International*, keempat sektor yang disebutkan oleh ICW merupakan sektor terkorup dalam kurun waktu 7 tahun, mulai pada tahun 2003 – 2010. Walaupun pada tahun 2005 institusi bea dan cukai sempat masuk dalam sektor terkorup tersebut (kompas.com, 2011).

Menurut Santosa (2011) korupsi di Indonesia sendiri disebabkan karena oligarkhi kekuasaan yang di mana negara dikuasai oleh sekelompok penguasa dan pedagang. Penguasa dan pedagang bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan. Dari kerjasama tersebut yang akhirnya merugikan masyarakat. Hal itu menunjukkan jika perilaku korupsi merupakan tindakan yang tidak prososial karena merugikan masyarakat. Dalam Sumaryanto (2007)

pada hakikatnya korupsi merupakan hasil pengembangan dari bentuk bentuk kejahatan yang perlu mendapatkan penanganan khusus. Hukum sebagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat harus dapat digunakan menjadi alat untuk menanggulangi dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Selain itu, dibutuhkan aparat-aparat yang memiliki mental, sikap, dan spiritual yang tangguh dalam melakukan penegakan hukum.

Selain itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia adalah karena adanya akar budaya yang menanamkan istilah korupsi, pemikiran bahwa korupsi itu wajar, unsur konsumerisme, karena pengaruh orang lain, dan lemahnya mental dan pemikiran rakyat Indonesia (Nida, 2011). Faktor yang menyebabkan korupsi tersebut tergantung motif dari pelaku korupsi itu sendiri. Motif melingkupi semua penggerak, alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Baik itu dikarenakan motif biogenesis maupun sosiogenesis. Motif biogenesis sendiri merupakan motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan manusia demi kelanjutan kehidupannya secara biologis. Sedang motif sosiogenesis merupakan motif-motif yang dipelajari manusia dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang tersebut tumbuh dan berkembang (Ahmadi, 1999). Indonesia dengan budaya ketimurannya sangat memegang teguh rasa kekeluargaan. Akan tetapi banyak orang yang memiliki persepsi yang salah tentang rasa kekeluargaan tersebut. Menurut Teobald (Shen & Wiliamson, 2005) masyarakat yang memiliki loyalitas kekeluargaan dan memiliki kuasa cenderung akan melakukan korupsi. Karena penggunaan kuasa untuk mengangkat orang terdekat menjadi pejabat publik tanpa memandang dampak dari pengangkatan tersebut merupakan nepotisme, yang dimana

nepotisme merupakan bagian dari korupsi (Alatas, 1983).

Korupsi tanpa disadari telah menjadi kebiasaan bagi sebagian orang. Dimulai dari orang tua yang sering memberikan imbalan kepada anaknya agar melakukan sesuatu yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Dengan membiasakan memberikan imbalan dapat membuat anak hanya akan bekerja apabila ada imbalan dan bukan untuk mengembangkan potensinya. Selain itu perilaku menyontek, berbohong dalam hal apapun, terlambat atau korupsi waktu, serta hal – hal yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri juga merupakan bentuk korupsi yang sangat sering dilakukan oleh setiap orang. Walaupun kecil itu sudah cukup untuk menumbuhkan kecenderungan untuk melakukan korupsi besar seperti, menyuap, memeras, dan melakukan nepotisme (Alatas, 1983). Berdasarkan hal tersebut, korupsi dapat terjadi karena adanya kebiasaan – kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan dari kebiasaan tersebut akhirnya membentuk budaya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fisman dan Miguel (2007) menunjukkan jika budaya dan norma sosial yang berkaitan dengan korupsi akan cukup sulit untuk diubah.

Ada beberapa negara yang sangat kuat memegang budaya norma sosial, salah satunya negara Jepang. Jepang merupakan negara yang terkenal karena budayanya. Dengan budayanya yang terkenal adalah *hara-kiri* atau bunuh diri menggunakan sebilah pedang. Hal ini biasanya dilakukan oleh jenderal perang pada saat mereka gagal atau kalah dalam perang. Karena mereka menganggap dengan mengalami kegagalan dan kekalahan mereka akan menanggung malu dan dari pada malu mereka akan memilih melakukan *hara-kiri*. Dengan melakukan *hara-kiri* mereka menganggap mereka mati layaknya pahlawan dan lebih terhormat

(Yamamoto, 2000). Di Jepang pun apabila ada pejabat yang mengalami kegagalan atau kesalahan mereka akan mengundurkan diri. Dari nilai-nilai budaya yang ditunjukkan oleh masyarakat Jepang dapat menjadi salah satu acuan bagi diri sendiri untuk melakukan pencegahan korupsi.

Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan budaya, salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan dengan empat etnis di dalamnya memiliki budaya yang menjadi panduan dalam menjalankan hidup, yaitu *siri'na pacce*. *Siri'na pacce* sendiri memiliki empat unsur di dalamnya, yaitu aktualisasi diri, rasa malu dan bersalah, kesetiaan, serta kejujuran. Aktualisasi diri merupakan keinginan individu untuk mengembangkan potensinya sendiri. Rasa malu dan bersalah merupakan bentuk sikap yang sangat dirasakan individu saat tidak dapat mentaati peraturan yang ada di masyarakat. Kesetiaan merupakan kemampuan dalam menjalankan amanah yang diberikan. Kejujuran yaitu individu berperilaku sesuai dengan hati nurani (Hamid, *et al.*, 2007). Dengan meresapi setiap unsur *siri'na pacce*, yaitu individu bekerja karena untuk mengembangkan potensinya, mentaati peraturan yang ada di masyarakat, dapat menjalankan amanah, dan melakukan sesuatu sesuai dengan hati nuraninya, maka individu tidak akan melakukan korupsi. Maka dari itu, kita tidak boleh melupakan budaya kedaerahan karena setiap budaya dibuat dengan tujuan dan maksud masing – masing.

Siri'na pacce sendiri merupakan sebuah nilai budaya yang dijadikan pedoman oleh masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja dalam menjalani kehidupan sehari – hari. *Siri'* berarti malu yang jika diartikan secara harfiah artinya harga diri. Sedangkan, *pacce* berarti pedih dan secara harfiah diartikan sebagai rasa solidaritas dan tolong menolong (Hamid, *et al.*, 2007).

Menurut Gouldner (Dayakisni & Hudaniah, 2012) mengemukakan bahwa ada norma timbal balik antara orang yang akan memberikan bantuan dan yang akan di tolong. Selain itu, dalam masyarakat juga berlaku norma bahwa kita harus menolong orang yang membutuhkan. Dalam Hamid, *et al* (2007) *siri'na pacce* memiliki pola budaya salah satunya yaitu budaya rasa malu (*shame culture*). Yang dimana *siri'* membentuk suasana hati seseorang, terlebih apabila seseorang melanggar norma dan nilai sosial. Suasana hati yang terbentuk karena adanya *siri'na pacce* tidak memperdulikan jiwa dan harta yang dimiliki orang lain, sehingga berakibat pada sebuah pengorbanan. Sebuah pengorbanan tersebut tidak akan memunculkan sebuah perasaan bersalah (*guilt culture*) tapi akan dirasakan sebagai kebanggaan karena menyangkut harga diri. Kalau hal ini direfleksikan dalam perilaku, apapun profesi yang dimiliki seseorang maka akan dijalankan sebaik-baiknya dan akan menjalankan kewajiban daripada terlalu banyak menuntut hak-hak. Karena budaya *siri'na pacce* lebih menuntut agar orang-orang menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya karena memiliki tanggung jawab sosial. Selain itu, dengan menjunjung tinggi harga diri dalam bekerja maka akan membuat individu lebih giat, amanah, serta mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran.

Ada beberapa etnis di Sulawesi Selatan yang masih memegang teguh budaya *siri'na pacce*. Tetapi saat ini dari beberapa etnis, budaya *siri'na pacce* mulai luntur. Hal tersebut ditandai dengan maraknya tawuran, ataupun pencurian dan perampokan yang dilakukan sekelompok orang, serta tindakan-tindakan lain yang meresahkan masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut menjadi contoh dari pudarnya nilai-nilai budaya *siri'na*

pacce yang ada di masyarakat, sehingga memunculkan pola perilaku negatif.

Budaya *siri'na pacce* merupakan bentuk dari perasaan halus dan suci (Hamid, *et al.*, 2007). Dengan memegang teguh budaya *siri'na pacce* dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari – hari akan menumbuhkan sikap positif sesuai dengan nilai yang terdapat pada budaya ini. Menurut Ahmadi (1999) sikap positif merupakan sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma- norma yang berlaku dimana individu tersebut tinggal. Adapun sikap positif dari pengaplikasian nilai budaya *siri'na pacce* adalah individu akan bekerja untuk meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Individu juga akan berusaha mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Menjaga amanah yang telah dipercayakan kepada individu tersebut. Serta, individu akan menjunjung tinggi nilai – nilai kejujuran dalam bekerja. Dengan berpegang teguh pada budaya *siri'na pacce* seperti apapun resiko, akan diterimanya baik dalam menjalankan hidup maupun sikap atau perilakunya (Hamid, *et al.*, 2007). Berdasarkan hal tersebut, *siri'na pacce* dapat dijadikan pedoman hidup untuk menumbuhkan sikap positif serta membuat hidup lebih berguna dan bermakna. Sehingga individu bekerja bukan karena hadiah atau imbalan yang diterima, tapi untuk mendapatkan kepuasan diri.

Dari berbagai penjelasan nilai budaya *siri'na pacce* yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki persamaan dengan budaya lain yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya sebuah kebudayaan memiliki konsep yang sama yaitu, untuk mengontrol perilaku individu sehingga membentuk suatu tatanan masyarakat yang baik. Sebagai contoh nilai budaya jawa yang memiliki konsep

tentang tata karma/sopan santun, kerukunan, ketaatan anak terhadap orang tua, disiplin dan tanggung jawab, serta kemandirian (Rachim, 2007).

Berbagai penjelasan tentang perilaku korupsi dan budaya *siri'na pacce* menggambarkan jika kedua variabel tersebut dapat dikaitkan satu sama lain. Hal itu dikarenakan, perilaku korupsi yang merupakan fenomena nyata dari perilaku negatif dan sangat merugikan masyarakat. Sedangkan, budaya *siri'na pacce* merupakan bentuk dari nilai kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan yang bertujuan membuat hidup lebih berguna, bermakna, dan positif. Sehingga diharapkan dengan menumbuhkan nilai – nilai budaya *siri'na pacce* dalam diridapat menekan perilaku korupsi dan membuat diri kita lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah korelasi (hubungan) antara nilai budaya *siri'na pacce* dengan perilaku korupsi? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi (hubungan) antara nilai budaya *siri'na pacce* dengan perilaku korupsi. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bentuk korelasi (hubungan) antara nilai budaya *siri'na pacce* dengan perilaku korupsi. Selain itu diharapkan juga agar dapat menambah wawasan tentang kajian psikologi sosial, khususnya lintas budaya.

1. Perilaku Korupsi

Perilaku korupsi menurut Alatas (1983) merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus dan kesewenangan terhadap sumber – sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang atau kekuasaan dan kekuatan – kekuatan formal, misalnya

dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri. Sedangkan KPK (2006) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan penggunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara dan dianggap sebagai tindak pidana.

Berdasarkan uraian definisi tersebut perilaku korupsi dapat disimpulkan sebagai perbuatan untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan terhadap kekayaan negara, serta merupakan suatu tindak pidana.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perilaku Korupsi

Dalam teori yang sering dikemukakan oleh Jack Bologne (dalam Putra, 2013) yang disebut dengan *GONE Theory*, bahwa faktor – faktor yang menyebabkan korupsi meliputi *greeds* (keserakahan), *opportunities* (kesempatan), *needs* (kebutuhan), dan *exposures* (pengungkapan). *Greeds* (keserakahan) berkaitan dengan sifat serakah yang berpotensi untuk dimiliki oleh semua orang. Selain itu, keserakahan disini bisa diartikan bahwa seseorang melakukan korupsi karena adanya rasa kurang puas atas apa yang dimiliki. *Opportunities* (kesempatan) berkaitan dengan keadaan lembaga atau instansi tempat seseorang tempat bekerja, dimana keadaan tempat tersebut membuka peluang seseorang untuk melakukan kecurangan. Misalnya sistem pengendalian ataupun sistem keamanan yang ada pada suatu lembaga atau instansi tidak ketat. *Needs* (kebutuhan) berkaitan dengan dengan pemenuhan kebutuhan – kebutuhan hidup seseorang. Yang dimana orang yang melakukan korupsi cenderung memiliki mental yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dia punya. *Exposure* (pengungkapan) Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang diterima

seorang pelaku kecurangan. Yang dimana pemberlakuan atau tindakan hukuman yang diberikan tidak memiliki efek jera terhadap pelaku korupsi.

3. Indikator Perilaku Korupsi

Dalam Alatas (1983) perilaku korupsi terdapat 3 fenomena yang tercakup, yaitu penyuapan (*bribery*), pegawai negeri yang menerima pemberian dari pihak lain dengan maksud agar pegawai tersebut memberikan perhatian lebih kepada kepentingan si pemberi. Pemerasan (*Extortion*), permintaan pemberian hadiah dalam melaksanakan tugas publik. Nepotisme, penggunaan kuasa untuk mengangkat orang terdekat menjadi pejabat publik tanpa memandang dampak dari pengangkatan tersebut.

4. Siri'na Pacce

Menurut Hamid, *et al* (2007) *siri'* merupakan suatu sistem nilai sosio-kultural dan kepribadian yang merupakan pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. *Siri'* merupakan kelayakan dalam kehidupan sebagai manusia yang diakui dan diperlakukan oleh sesamanya. Orang yang tidak memperoleh perlakuan yang sama akan merasa harga dirinya dilanggar. Perlakuan yang tidak layak tersebut berupa pelanggaran hak-hak penghinaan dan sejenisnya yang dapat menimbulkan reaksi dari orang yang *dipakasiri'* atau yang dibuat malu. *Siri'* tidak bermakna negatif dan tidak hanya bersifat menentang, tetapi *siri'* merupakan perasaan halus dan suci. *Siri'* selain sebagai sebuah harga diri dan kehormatan, *siri'* juga menuntut adanya disiplin, kesetiaan, dan kejujuran. *Pacce* dalam bahasa Makassar dan *Pesse* dalam bahasa bugis merupakan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat rela berkorban, bekerja keras

dan pantang mundur. Selain itu *pacce* atau *pesse* merupakan suatu perasaan hati yang menyayat pilu terlebih apabila sesama warga masyarakat, keluarga, atau sahabat yang ditimpa kemalangan, yang menimbulkan suatu dorongan ke arah solidaritas dalam berbagai bentuk terhadap mereka yang ditimpa kemalangan (Hamid, *et al.*, 2007).

Dari uraian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *siri'na pacce* merupakan bentuk harga diri, martabat, dan rasa senasib sepenanggungan atau solidaritas dari masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja serta dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari – hari dan berperilaku baik bagi individu itu sendiri maupun terhadap lingkungannya.

5. Indikator Siri'na Pacce

Hamid, *et al* (2007) memetakan indikator-indikator dari nilai budaya *siri'na pace*. Pertama, aktualisasi diri merupakan kesungguhan individu dalam bekerja secara maksimal dengan menggunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Kedua, adanya rasa malu dan rasa bersalah, yaitu adanya rasa malu dan rasa bersalah yang sangat mendalam dialami oleh individu karena tidak mampu mentaati aturan yang berlaku dalam masyarakat, tidak mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama, dan tidak mampu menunjukkan sikap disiplin dalam segala aktivitasnya. Rasa malu dan rasa bersalah yang dirasakan individu juga sangat berpengaruh besar terhadap suasana hatinya. Ketiga, Kesetiaan, bentuk dari kesetiaan ini adalah kemampuan dalam menjaga amanah yang telah dipercayakan dan memegang teguh janji yang telah dibuat. Keempat, Kejujuran yaitu terjadinya sinkronisasi antara pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan sehingga membuat individu berperilaku sesuai hati nurani dan kebenaran.

***Siri'na Pacce* dan Perilaku Korupsi**

Hamid, *et al* (2007) memetakan nilai budaya *siri'na pacce* ke dalam empat unsur, yaitu aktualisasi diri, rasa malu dan rasa bersalah, kesetiaan, serta kejujuran. Aktualisasi diri merupakan kesungguhan individu dalam bekerja secara maksimal dengan menggunakan potensi – potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Rasa malu dan rasa bersalah yaitu adanya rasa malu dan rasa bersalah yang sangat mendalam dialami oleh individu karena tidak mampu mentaati aturan yang berlaku dalam masyarakat, tidak mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama, dan tidak mampu menunjukkan sikap disiplin dalam segala aktivitasnya. Rasa malu dan rasa bersalah yang dirasakan individu juga sangat berpengaruh besar terhadap suasana hatinya. Kesetiaan merupakan kemampuan dalam menjaga amanah yang telah dipercayakan dan memegang teguh janji yang telah dibuat. Dan Kejujuran yaitu terjadinya sinkronisasi antara pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan sehingga membuat individu berperilaku sesuai hati nurani dan kebenaran.

Menurut Alatas (1983) perilaku korupsi terdapat 3 fenomena yang tercakup, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. Penyuapan (*bribery*) merupakan pegawai negeri yang menerima pemberian dari pihak lain dengan maksud agar pegawai tersebut memberikan perhatian lebih kepada kepentingan si pemberi. Pemerasan (*extortion*) merupakan permintaan pemberian hadiah dalam melaksanakan tugas publik. Nepotisme merupakan penggunaan kuasa untuk mengangkat orang terdekat menjadi pejabat publik tanpa memandang dampak dari pengangkatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, individu yang menghayati nilai budaya *siri'na pacce* akan memunculkan perilaku yang positif

dalam menjalankan kehidupan sehari – hari (Ahmadi, 1999). Individu akan bekerja secara maksimal dengan menggunakan potensi – potensi yang ada pada dirinya. Individu akan sangat mentaati peraturan yang ada dalam masyarakat, menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dan akan menunjukkan sikap disiplin dalam melakukan segala aktivitasnya. Selain itu, individu akan menjaga amanah yang telah dipercayakan kepadanya dan memegang teguh janji yang telah dibuat. Serta individu akan berperilaku sesuai hati nurani dan kebenaran. Sedangkan, individu yang memiliki perilaku korupsi akan bekerja saat mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Individu yang memiliki perilaku korupsi juga akan bekerja dengan meminta imbalan atau hadiah dalam melaksanakan tugas publik. Individu tersebut juga akan memanfaatkan jabatannya untuk mengangkat orang terdekatnya menjadi pejabat publik tanpa memandang dampak dari pengangkatan tersebut.

Dilihat dari unsur nilai budaya *siri'na pacce* dan dikaitkan dengan ciri – ciri perilaku korupsi maka, individu yang melakukan korupsi akan memanfaatkan potensi – potensi yang ada pada dirinya hanya pada saat mendapatkan imbalan atau hadiah dari individu lain untuk melakukan tugasnya. Individu tersebut juga tidak memiliki rasa malu dan bersalah karena tidak mentaati peraturan yang ada di dalam masyarakat. Individu yang melakukan korupsi tidak dapat dipercaya karena telah mengingkari amanah dan janji yang telah dibuatnya. Serta individu tersebut tidak berperilaku sesuai dengan hati nurani dan kebenaran karena tindakan yang diambil individu sangat merugikan masyarakat di sekitarnya.

Dari hubungan kedua variabel tersebut, penanaman nilai budaya *siri'na pacce* dianggap perlu untuk mencegah perilaku

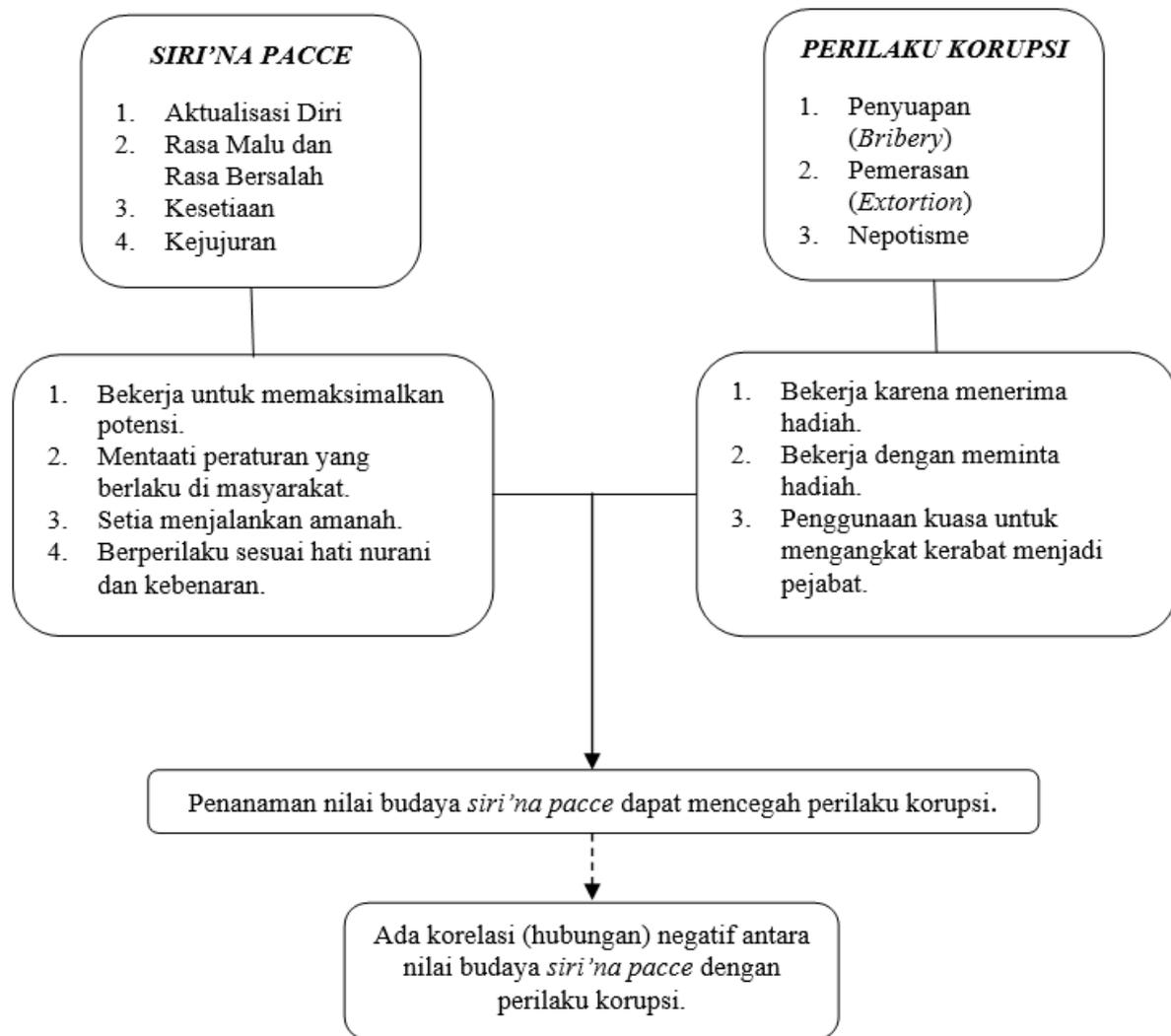
korupsi. Karena dengan individu memiliki nilai budaya *siri'na pacce* dalam dirinya maka individu akan bekerja semaksimal mungkin dengan memanfaatkan potensi – potensi yang ada pada dirinya, bukan karena imbalan ataupun hadiah yang diberikan. Individu juga akan mentaati peraturan yang berlaku dalam masyarakat, memiliki sikap kepedulian yaitu dengan tidak mengangkat kerabat dekatnya untuk menjadi pejabat publik yang tidak diketahui dampaknya bagi masyarakat, serta akan menunjukkan sikap disiplin dalam menjalankan tugas. Individu akan menjaga amanah atau tugas yang telah dipercayakan kepadanya dan memanfaatkan kewenangannya dengan sebaik – baiknya sehingga tidak merugikan masyarakat. Serta individu akan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hati nuraninya dan kebenaran yang ada bukan menyembunyikan atau menghilangkan kebenaran tersebut.

Menurut Maecmusd (dalam Hamid, *et al.*, 2007) dalam budaya *siri'na pacce* terdapat empat karakter dan sifat manusia yang disebut dengan *sulapak eppa'e*. dimana sifat manusia dibagi kedalam empat elemen angin, api, air dan tanah. Angin sendiri digambarkan dengan melakukan kekerasan yang tidak berdasarkan kejujuran dan hanya menempuh satu jalan tanpa berusaha mencari jalan yang lebih baik. Sedangkan api digambarkan sebagai individu yang suka marah atau bertindak keras tanpa memikirkan hasil dari perbuatannya, yang dalam istilah Makassar disebut *pabbambangngi natolo*. Air digambarkan sebagai individu yang melanggar menggunakan belas kasihan yang tidak bermoral untuk menetapkan suatu hal, sehingga melindungi individu yang bersalah karena individu tersebut merupakan orang

terdekatnya. Tanah digambarkan sebagai sifat yang bergerak, jujur dan kuat, serta digambarkan sebagai individu yang memiliki *siri'* yang sempurna.

Individu yang memiliki perilaku korupsi masuk dalam kategori karakter atau sifat angin dan air. Hal itu dikarenakan individu yang memiliki sifat angin merupakan orang yang curang, mengambil jalan pintas sekali pun tercela, serta dikategorikan "*to ranga sela*" yaitu orang yang tidak memiliki pendirian, tidak berprinsip, dan mata duitan seperti halnya korupsi. Sifat air sendiri merupakan individu yang memanfaatkan jabatannya untuk melindungi orang terdekatnya yang bersalah (Maecmusd, dalam Hamid, *et al.*, 2007).

Selain itu, jika dilihat dari nilai yang menyangkut makna *siri'* dengan perilaku korupsi, yaitu *siri'* sebagai keteguhan hati. Menurut Wahid (2010) *siri'* sebagai keteguhan hati atau yang dalam bahasa Makassar disebut *tu tinggi siri'na* merupakan individu yang dapat menentukan sikap sesuai dengan kebenaran dari ketetapan hati nuraninya yang benar atau memiliki teguh kepribadian yang kuat. Dimana individu yang melakukan korupsi tidak memiliki keteguhan hati dalam dirinya dan tidak dapat menentukan sikap untuk melakukan hal yang benar dan berani melawan korupsi dengan tanpa rasa ragu sedikit pun didalam dirinya. Dengan menanamkan nilai – nilai budaya *siri'na pacce* dalam diri setiap individu diharapkan dapat membangun keteguhan hati individu untuk berbuat korupsi. Sehingga individu dapat mencegah munculnya perilaku korupsi dimulai dari dalam diri individu masing – masing.



Gambar. 1
Kerangka berpikir nilai budaya siri'na pacce dan perilaku korupsi

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Ada korelasi (hubungan) negatif antara nilai budaya *siri'na pacce* dengan perilaku korupsi. Semakin tinggi nilai budaya *siri'na pacce* pada masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, maka semakin rendah kecenderungan orang untuk melakukan korupsi. Sebaliknya, jika semakin rendah nilai budaya *siri'na pacce* pada masyarakat Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, maka semakin tinggi kecenderungan orang untuk melakukan korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional untuk menguji ada tidaknya korelasi (hubungan) antara variabel bebas dan variabel terikat (Sugiyono, 2012). Selain itu, dalam penelitian ini juga mengukur taraf signifikansi antara variabel bebas dan variabel terikat yang akan diteliti.

Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah (1) berjenis kelamin laki – laki atau perempuan. (2) Memiliki rentang umur antara 17 – 50 tahun dengan status pelajar, mahasiswa, dan pekerja. (3) Keturunan

etnis Bugis, Makassar, Mandar, atau Toraja. (4) Tinggal di Sulawesi Selatan mulai dari masa kanak – kanak awal sampai remaja akhir. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *nonprobability sampling*, yaitu sampling kuota. Sampling kuota merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan jumlah sampel berdasarkan ciri – ciri atau karakteristik tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan tercapai (Sugiyono, 2012). Alasan penggunaan sampling kuota dikarenakan peneliti tidak mengetahui berapa jumlah populasi dari subjek. Adapun jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 240 orang. Dengan jumlah etnis Bugis 60 orang, etnis Makassar 60 orang, etnis Mandar 60 orang, dan Toraja 60 orang. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan 80 orang pelajar, 80 orang mahasiswa, dan 80 orang pekerja.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *siri'na pacce* dan perilaku korupsi. Dimana variabel terikat dari penelitian ini adalah perilaku korupsi dan variabel bebas dalam penelitian ini adalah *siri'na pacce*. Perilaku korupsi merupakan perilaku yang menggunakan jabatan atau status dalam berbuat kecurangan dalam bentuk suap-menyuap, penggelapan dana, pemerasan,

pemberian hadiah, dan pengangkatan kerabat dekat menjadi pejabat publik. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengukur perilaku korupsi disusun oleh Dayakisni, yang peneliti temukan dalam penelitian Rosyidi (2015) dengan jumlah item yang akan diujikan berjumlah 30. Skala perilaku korupsi dibuat berdasarkan tiga indikator, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (Alatas, 1983).

Sedangkan *siri'na pacce* merupakan sikap yang bersumber dari budaya Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga harga diri, menjaga amanah, melakukan tugas yang diberikan secara maksimal, jujur, memiliki keteguhan hati, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Untuk mengukur variabel bebas peneliti akan menggunakan skala *siri'na pacce* yang diadaptasi dari Mashuri (2015) dengan jumlah item yang akan diujikan berjumlah 24 item. Skala *siri'na pacce* dibuat berdasarkan indikator-indikator yaitu aktualisasi diri, rasa malu dan rasa bersalah, kesetiaan, serta kejujuran (Hamid, *et al.*, 2007).

Adapun indeks validitas dan reliabilitas dari kedua skala ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.
Indeks Validitas Alat Ukur Penelitian

Alat Ukur	Jumlah Item Diujikan	Jumlah Item Valid	Indeks Validitas	Nilai Reliabilitas (Cronbach's Alpha)
Skala Perilaku Korupsi	30	19	0.309 – 0.613	0.854
Skala <i>Siri'na Pacce</i>	24	22	0.347 – 0.667	0.894

Berdasarkan tabel 1, skala perilaku korupsi saat sebelum diujikan berjumlah 30 item, dan setelah diujikan didapatkan 19 item yang valid. Indeks validitas skala perilaku korupsi berkisar antara 0.309-0.613 dengan nilai reliabilitas 0.854. Sedangkan skala *siri'na pacce* memiliki jumlah 24

item sebelum diujikan dan setelah diujikan didapatkan 22 item yang valid. Untuk indeks validitas skala *siri'na pacce* berkisar antara 0.347-0.667 dengan nilai reliabilitas 0.894.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Skala *likert* merupakan skala untuk mengukur sikap, pendapat,

dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Skala ini terdiri dari item *favorable* dan *unfavorable*, yang dimana setiap item mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2012). Skala perilaku korupsi dan *siri'na pacce* memiliki pilihan jawaban yaitu, SS (sangat sesuai), S (sesuai), TS (tidak sesuai), dan STS (sangat tidak sesuai). Metode yang digunakan dalam kedua skala ini adalah metode *checklist*.

Secara umum penelitian ini menggunakan tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisa data. Adapun penjelasan tentang prosedur penelitian setiap tahap adalah sebagai berikut:

- Pada tahap persiapan, peneliti terlebih dahulu mengerjakan proposal penelitian. Peneliti kemudian mulai mencari skala perilaku korupsi dan skala *siri'na pacce*. Untuk skala perilaku korupsi, peneliti menggunakan skala yang dibuat oleh Dayakisni yang peneliti temukan dalam penelitian Rosyidi (2015). Sedangkan, untuk skala *siri'na pacce* peneliti mengadaptasi dari skala yang dibuat oleh Mashuri (2015). Setelah proposal selesai dan peneliti telah menemukan serta mengadaptasi skala, peneliti melakukan seminar proposal dan peneliti mulai melakukan *try out* skala. Lokasi untuk melakukan *try out* skala tersebut bertempat di Kota Makassar dengan jumlah subjek yang digunakan sebanyak 57 orang. Selanjutnya dari hasil *try out* yang telah dilakukan, peneliti menguji validitas dan reliabilitas skala. Adapun pelaksanaan *try out* dan penelitian dilakukan pada tanggal 8 November 2015-24 November 2015.

- Pada tahap pelaksanaan, peneliti mulai menyebarkan skala yang telah valid dan reliabel. Yaitu dengan menyebarkan skala perilaku korupsi dan skala *siri'na pacce* secara bersamaan kepada subjek dengan karakteristik yang sesuai. Adapun lokasi pengambilan data berada di Kota Makassar dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 240 orang. Dengan jumlah sampel suku Bugis 60 orang, Makassar 60 orang, Mandar 60 orang, dan Toraja 60 orang. Selain itu, dari jumlah subjek yang berjumlah 240 orang, terdapat subjek yang berstatus pelajar berjumlah 80 orang, mahasiswa 80 orang, dan pekerja 80 orang.
- Selanjutnya, tahap ketiga adalah tahap analisa data. Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan input data hasil penyebaran skala yang telah dilakukan. Setelah melakukan input data, peneliti mulai melakukan analisis data dengan menggunakan uji korelasi *pearson* atau *product moment*. Uji korelasi *pearson* atau *product moment* digunakan untuk menguji korelasi atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Sugiyono, 2012). Lalu, dari hasil analisis tersebut peneliti mulai membahas tentang hasil keseluruhan dari penelitian yang dilakukan dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 240 subjek diperoleh beberapa hasil yang akan dijelaskan dengan tabel-tabel berikut.

Tabel 2.
Klasifikasi Perilaku Korupsi

Kategori	Interval	Jumlah Subjek	Persentase
Sangat Tinggi	67.16 – 76	1	0.41%
Tinggi	56.83 – 67.15	17	7.08%
Sedang	46.52 – 56.82	31	12.92%
Rendah	36.20 – 46.51	130	54.17%
Sangat Rendah	19 – 36.19	61	25.42%
Total		240	100%

Berdasarkan tabel 2 di atas, perilaku korupsi dibagi ke dalam lima kategori yaitu, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Dengan interval masing-masing kategori yaitu, 67.16-76 kategori sangat tinggi, 56.83-67.15 kategori tinggi, 46.52-56.82 kategori sedang, 36.20-46.51 kategori rendah, dan 19-36.19 kategori sangat rendah. Dari jumlah subjek yang berjumlah 240 terdapat 1 subjek yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 17 subjek yang masuk dalam kategori tinggi, 31 subjek yang masuk dalam kategori sedang, 130 subjek yang masuk dalam kategori rendah dan 61 subjek yang masuk dalam kategori sangat rendah. Dari jumlah subjek pada setiap kategori, menghasilkan persentase dimana kategori sangat tinggi memiliki persentase 0.41%, kategori tinggi 7.08%, kategori sedang 12.92%, kategori rendah 54.17%, dan kategori sangat rendah 25.42%.

Tabel 3.
Klasifikasi Nilai Budaya *Siri'na Pacce*

Kategori	Interval	Jumlah Subjek	Persentase
Sangat Tinggi	77.30 – 88	58	24.17%
Tinggi	64.68 – 77.29	144	60%
Sedang	52.06 – 64.67	19	7.92%
Rendah	39.43 – 52.05	14	5.83%
Sangat Rendah	22 – 39.42	5	2.08%
Total		240	100%

Berdasarkan tabel 3 di atas, nilai budaya *siri'na pacce* dibagi ke dalam lima kategori yaitu, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Dengan interval masing-masing kategori yaitu, 77.30-88 kategori sangat tinggi, 64.68-77.29 kategori tinggi, 52.06-64.67 kategori sedang, 39.43-52.05 kategori rendah, dan 22-39.42 kategori sangat rendah. Dari jumlah subjek yang berjumlah 240 terdapat 58 subjek yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 144 subjek yang masuk dalam kategori tinggi, 19 subjek yang masuk dalam kategori sedang, 14 subjek yang masuk dalam kategori rendah dan 5 subjek yang masuk dalam kategori sangat rendah. Dari jumlah subjek pada setiap kategori, menghasilkan persentase dimana kategori sangat tinggi memiliki persentase 24.17%, kategori tinggi 60%, kategori sedang 7.92%, kategori rendah 5.83%, dan kategori sangat rendah 2.08%.

Tabel 4.
Mean Perilaku Korupsi Berdasarkan Etnis

Etnis	Mean	Kategori
Bugis	39.87	Rendah
Makassar	41.52	Rendah
Mandar	41.18	Rendah
Toraja	42.87	Rendah

Berdasarkan tabel 4, *mean* atau rata-rata perilaku korupsi terhadap masing-masing etnis adalah sebagai berikut. Etnis Bugis memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 39.87. Etnis Makassar memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 41.52. Etnis Mandar memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 41.18. Dan Etnis Toraja memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 42.87. Dari *mean* atau nilai rata-rata setiap etnis menunjukkan, jika etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja memiliki perilaku korupsi yang rendah.

Tabel 5.
Mean Nilai Budaya *Siri'na Pacce* Berdasarkan Etnis

Etnis	Mean	Kategori
Bugis	72.40	Sangat Tinggi
Makassar	70.75	Sangat Tinggi
Mandar	71.48	Sangat Tinggi
Toraja	69.42	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 5, *mean* atau rata-rata nilai budaya *siri'na pacce* terhadap masing-masing etnis adalah sebagai berikut. Etnis Bugis memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 72.40. Etnis Makassar memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 70.75. Etnis Mandar memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 71.48. Dan Etnis Toraja memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 69.42. Dari *mean* atau nilai rata-rata setiap etnis menunjukkan, jika etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja memiliki perilaku nilai budaya *siri'na pacce* yang sangat tinggi.

Tabel 6.
Mean Perilaku Korupsi Berdasarkan Status Pekerjaan

Status	Mean	Kategori
Pelajar	42.03	Rendah
Mahasiswa	40.20	Rendah
Pekerja	41.80	Rendah

Berdasarkan tabel 6, *mean* atau rata-rata perilaku korupsi terhadap status pekerjaan subjek adalah sebagai berikut. Subjek dengan status pelajar memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 42.03. Subjek dengan status mahasiswa memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 40.20. Dan subjek dengan status pekerja memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 41.80. Dari *mean* atau nilai rata-rata setiap status pekerjaan subjek menunjukkan, subjek dengan status pelajar, mahasiswa, dan pekerja memiliki perilaku korupsi yang rendah.

Tabel 7.
Mean Nilai Budaya *Siri'na Pacce* Berdasarkan Status Pekerjaan

Status	Mean	Kategori
Pelajar	70.70	Sangat Tinggi
Mahasiswa	71.94	Sangat Tinggi
Pekerja	70.41	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 7, *mean* atau rata-rata nilai budaya *siri'na pacce* terhadap status pekerjaan subjek adalah sebagai berikut. Subjek dengan status pelajar memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 70.70. Subjek dengan status mahasiswa memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 71.94. Dan subjek dengan status pekerja memiliki *mean* atau rata-rata nilai sebesar 70.41. Dari *mean* atau nilai rata-rata setiap status pekerjaan subjek menunjukkan, subjek dengan status pelajar, mahasiswa, dan pekerja memiliki nilai budaya *siri'na pacce* yang sangat tinggi.

Tabel 8.
Hasil Uji Korelasi *Pearson-Product Moment*

N	R	r ²	p	Alpha	Kesimpulan
240	-0.468	0.219	0.000	0.01	Signifikan

Berdasarkan hasil uji korelasi *pearson*, diperoleh nilai koefisien korelasi (*r*) sebesar -0.468 yang berarti nilai budaya *siri'na pacce* memiliki hubungan timbal balik dengan perilaku korupsi. Selain itu, nilai signifikan (*p*) dari hasil analisa data menunjukkan $0.000 < 0.01$ yang artinya kedua variable tersebut menunjukkan hubungan negatif yang signifikan, dengan taraf kesalahan (*alpha*) 0.01 serta berada pada taraf kepercayaan 99%. Adapun nilai budaya *siri'na pacce* mempengaruhi perilaku korupsi sebesar 21.9%. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien determinasi (*r*²) sebesar 0.219, sementara sisanya 78,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, membuktikan jika ada hubungan yang negatif atau timbal balik dari nilai budaya *siri'na pacce* dengan perilaku korupsi. Dimana semakin tinggi nilai budaya *siri'na pacce* yang dianut etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, maka semakin rendah perilaku korupsi yang muncul. Sebaliknya, jika semakin rendah nilai budaya *siri'na pacce* yang dianut etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, maka semakin tinggi perilaku korupsi yang muncul.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan jika, nilai budaya *siri'na pacce* dapat menjadi salah satu faktor untuk menekan perilaku korupsi khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai yang ada pada budaya *siri'na pacce* yang menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu sebaik-baiknya dengan mengandalkan potensi yang ada pada dirinya, mentaati peraturan yang

berlaku dalam masyarakat dan memiliki kepedulian terhadap sesamanya, memegang teguh janji atau amanah yang telah dibuat, serta jujur dalam setiap hal yang dilakukan (Hamid, *et al.*, 2007). Sedangkan perilaku korupsi menuntut seseorang untuk bekerja karena imbalan atau hadiah, ataupun untuk memenuhi tujuan pribadi atau kelompok yang dampaknya tidak menguntungkan masyarakat yang ada di sekitarnya (Alatas, 1983).

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *siri'na pacce* tersebut. Nilai budaya *siri'na pacce* itu sendiri antara lain aktualisasi diri, rasa malu dan rasa bersalah, kesetiaan, dan kejujuran. Aktualisasi diri merupakan kesungguhan individu dalam bekerja secara maksimal dengan menggunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Rasa Malu dan rasa bersalah, yaitu adanya rasa malu dan rasa bersalah yang sangat mendalam dialami oleh individu karena tidak mampu mentaati aturan yang berlaku dalam masyarakat, tidak mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama, dan tidak mampu menunjukkan sikap disiplin dalam segala aktivitasnya. Kesetiaan, bentuk dari kesetiaan ini adalah kemampuan dalam menjaga amanah yang telah dipercayakan dan memegang teguh janji yang telah dibuat. Kejujuran yaitu terjadinya sinkronisasi antara pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan sehingga membuat individu berperilaku sesuai hati nurani dan kebenaran (Hamid, *et al.*, 2007).

Sedangkan bentuk dari perilaku korupsi itu sendiri yaitu, penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. Penyuapan (*bribery*), pegawai negeri yang

menerima pemberian dari pihak lain dengan maksud agar pegawai tersebut memberikan perhatian lebih kepada kepentingan si pemberi. Pemerasan (*extortion*), permintaan pemberian hadiah dalam melaksanakan tugas publik. Nepotisme, penggunaan kuasa untuk mengangkat orang terdekat menjadi pejabat publik tanpa memandang dampak dari pengangkatan tersebut (Alatas, 1983).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, nilai budaya *siri'na pacce* dapat mempengaruhi perilaku korupsi dikarenakan individu akan bekerja secara maksimal menggunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya bukan karena hadiah yang diberikan atau diminta dari pihak lain. Individu juga akan bekerja dengan mentaati peraturan yang ada di dalam masyarakat dan dapat menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama, dengan tidak meminta atau menerima pemberian pungutan selain yang telah ditetapkan oleh lembaga sendiri, serta tidak menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk mengangkat kerabat dekat menjadi pejabat publik yang dampaknya belum tentu menguntungkan masyarakat. Selanjutnya, individu akan bekerja sesuai dengan yang diamanahkan pada dirinya dan memegang teguh janji yang telah dibuat, sehingga individu tidak akan bekerja diluar prosedur yang telah ditentukan atau yang diamanatkan pada dirinya dengan tidak akan menerima dan meminta hadiah dalam menjalankan tugasnya, ataupun menggunakan kuasanya dalam mengangkat kerabat dekat menjadi petugas publik. Selain itu, individu akan bekerja sesuai dengan hati nurani dan kebenaran, sehingga individu tidak akan melakukan kecurangan dalam bentuk sekecil apapun dan menghindari hal-hal yang akan merugikan diri sendiri dan masyarakat luas.

Penelitian serupa, yang dilakukan oleh Shen & Wiliamson (2005) menunjukkan

jika ada hubungan negatif antara perilaku korupsi dengan budaya pada beberapa negara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut semakin menguatkan jika budaya sebagai pedoman dalam suatu lingkup masyarakat dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya perilaku korupsi. Selain itu budaya merupakan sebuah pedoman untuk mengajarkan suatu tatanan kehidupan yang baik. Karena apabila pada suatu masyarakat memiliki tatanan yang kurang baik, misalnya dengan pemerintah pada suatu negara melakukan perilaku korupsi maka kemungkinan masyarakat umum untuk mengikutinya semakin besar. Hal tersebut ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Barr & Serra (2006) dimana korupsi telah menjadi suatu fenomena yang terjadi di masyarakat karena perilaku tersebut ditunjukkan oleh pelayan publik. Sehingga, apabila masyarakat telah menganggap perilaku korupsi menjadi hal biasa dan masyarakat terbiasa akan hal itu maka korupsi akan menjadi bagian dari budaya pada masyarakat tersebut.

Budaya *siri'na pacce* pada karakter manusia dibagi kedalam empat yaitu sifat angin, api, air, dan tanah. Sifat angin digambarkan sebagai seseorang yang curang, selalu mengambil jalan pintas walaupun tercela dan dikategorikan "*to ranga sela*", yaitu orang tidak berprinsip dan mata duitan. Sifat api diibaratkan sebagai seseorang yang suka marah, mengamuk dan tidak memperhitungkan akibat dari kemarahannya tersebut dan disebut sebagai "*pabbambangangi natolo*". Sifat air diibaratkan orang yang pintar dan teliti tetapi mengandalkan belas kasihan yang melanggar moral dalam menetapkan suatu hal, sehingga cenderung melindungi orang yang bersalah tersebut karena orang itu kerabat dekatnya dan menggambarkan sifat nepotisme.

Sifat tanah diibaratkan sebagai orang yang bergerak, jujur dan kuat atau disebut sebagai orang yang memiliki *siri'* yang sempurna (Maecmusd, dalam Hamid, *et al.*, 2007).

Pada penggambaran karakter manusia tersebut, orang yang memiliki perilaku korupsi termasuk dalam sikap angin dan air. Dimana sikap angin digambarkan oleh La Tadamperek Puang ri Manggalatung, sebagai berikut:

...berbicara silangi riona riatue nadde tekeng bicara, nasabak riwerenna warangparang ri toribicarae, ianaritu mala pasoosok sipak angin ritu ke dona. Angingnge mangkauk mautang tanai lempuk, engkana mau maka naolanaoli, pura pole araik, pura pole alauk.

Artinya: sebuah hasil musyawarah atau sebuah keputusan yang merusak negeri ini adalah ketika seorang pejabat publik yang memberikan sebuah keputusan atas suatu perkara karena menerima imbalan dari orang yang diadili (Hamid, *et al.*, 2007).

Dari penjelasan tersebut karakter angin dapat dihubungkan dengan aspek dari perilaku korupsi yaitu, penyuapan (*bribery*) dan pemerasan (*extortion*). Dimana penyuapan (*bribery*) merupakan pegawai negeri yang menerima pemberian dari pihak lain dengan maksud agar pegawai tersebut memberikan perhatian lebih kepada kepentingan si pemberi. Sedangkan pemerasan (*extortion*) merupakan permintaan pemberian hadiah dalam melaksanakan tugas publik (Alatas, 1983).

Hamid, *et al* (2007) menyatakan bahwa sikap air sendiri digambarkan pada kata-kata Nenek Malomo yang telah menghukum mati anak kandungnya sendiri karena

dipersalahkan mencuri kayu. Adapun kutipan kata Nenek Malomo adalah sebagai berikut:

Adek e temmakeanak temmakeappo

Artinya: Hukum adat tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.

Adegium Nenek Malomo tersebut juga memiliki makna yang sama dengan adegium dari Amerika yaitu, *justice look at truth alone* (Hamid, *et al.*, 2007). Dari gambaran sifat air tersebut jika dihubungkan dengan aspek perilaku korupsi dalam Alatas (1983) adalah nepotisme. Dimana nepotisme merupakan penggunaan kuasa untuk mengangkat orang terdekat menjadi pejabat publik tanpa memandang dampak dari pengangkatan tersebut.

Dari penejelasan mengenai karakter atau sifat manusia yang dibahas dalam Hamid, *et al* (2007) dapat diketahui jika perilaku korupsi telah ada pada saat hukum adat dalam penegakan nilai budaya *siri'na pacce* masih sangat berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penjelasan mengenai bentuk dari perilaku korupsi walaupun dalam sebuah bentuk sejarah. Selain itu juga membuktikan jika perilaku korupsi muncul bukan karena zaman yang semakin maju yang diikuti oleh tuntutan kebutuhan yang tinggi. Tetapi, perilaku korupsi telah hadir pada saat hukum yang berlaku hanya hukum adat dengan unsur kedaerahan.

Hasil analisa didapatkan koefisien determinasi (r^2) dari kedua variable tersebut adalah 0.219. Artinya nilai budaya *siri'na pacce* memiliki pengaruh sebesar 21,9% dalam mempengaruhi perilaku korupsi dan 78,1% di pengaruhi oleh faktor lain. Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku korupsi tersebut yaitu, *power distance*, *individualism*, *masculinity/feministy*, dan

uncertainty avoidance. *Power distance* berfokus pada persamaan dan perbedaan setiap individu dalam satu masyarakat. *Individualism* berfokus pada pendapatan dan hubungan antar individu. *Masculinity/feministy* berfokus pada peran pria dan wanita berdasarkan gender. *Uncertainty avoidance* berfokus pada ketidakpastian dan ketidakjelasan antara masyarakat dan bentuk situasi masyarakat tersebut (Hofstede, dalam Murdoch, 2009).

Selain dari faktor-faktor tersebut, Jack Bologne (dalam Putra, 2013) juga memiliki teori tentang faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, yang disebut dengan *GONE Theory*. Dimana *GONE Theory* terdiri dari *greeds* (keserakahan), *opportunities* (kesempatan), *needs* (kebutuhan), dan *exposures* (pengungkapan). *Greeds* (keserakahan) berkaitan dengan sifat serakah yang berpotensi untuk dimiliki oleh semua orang. Selain itu, keserakahan disini bisa diartikan bahwa seseorang melakukan korupsi karena adanya rasa kurang puas atas apa yang dimiliki. *Opportunities* (kesempatan) berkaitan dengan keadaan lembaga atau instansi tempat seseorang tempat bekerja, dimana keadaan tempat tersebut membuka peluang seseorang untuk melakukan kecurangan. Misalnya sistem pengendalian ataupun sistem keamanan yang ada pada suatu lembaga atau instansi tidak ketat. *Needs* (kebutuhan) berkaitan dengan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup seseorang. Yang dimana orang yang melakukan korupsi cenderung memiliki mental yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dia punya. *Exposure* (pengungkapan) Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang diterima seorang pelaku kecurangan. Yang dimana pemberlakuan atau tindakan hukuman yang

diberikan tidak memiliki efek jera terhadap pelaku korupsi.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan jika nilai budaya *siri'na pacce* memiliki korelasi yang negatif atau timbal balik dengan perilaku korupsi. Yang artinya semakin besar nilai budaya *siri'na pacce* yang dianut masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, maka semakin kecil perilaku korupsi yang akan dimunculkan. Sebaliknya, jika semakin kecil nilai budaya *siri'na pacce* yang dianut masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, maka semakin besar perilaku korupsi yang akan dimunculkan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian juga membuktikan jika nilai budaya *siri'na pacce* dapat menjadi salah satu faktor untuk menekan perilaku korupsi. Sehingga, diharapkan dengan menanamkan nilai – nilai budaya *siri'na pacce*, perilaku korupsi dapat dicegah.

Implikasi dari penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memaknai arti dari sebuah kebudayaan, khususnya budaya *siri'na pacce*. Karena dengan memaknai dan menanamkan nilai – nilai budaya *siri'na pacce* akan membuat diri menjadi lebih bermanfaat terutama dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Selain sebagai pedoman dalam kehidupan sehari – hari, nilai budaya *siri'na pacce* juga merupakan sebuah alat untuk mengontrol sikap dan perilaku setiap individu. Serta untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih bermoral dan beretika. Sehingga, diharapkan nilai – nilai yang ada pada budaya *siri'na pacce* harus tetap dipertahankan dan dilestarikan.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan perilaku korupsi sebagai

variabel terikat lebih baik membandingkan perilaku korupsi tersebut berdasarkan jenis kelamin atau gender. Perilaku korupsi dapat juga dihubungkan dengan nilai – nilai budaya lokal Indonesia yang lain. Perilaku korupsi dapat juga dihubungkan dengan *hedonism*. Selain itu, untuk subjek penelitian dalam perilaku korupsi ini sebaiknya dilakukan terhadap subjek yang memiliki pekerjaan spesifik, misalnya pelayanan publik.

Sedangkan, jika ingin menggunakan nilai budaya *siri'na pacce* sebagai variabel, dapat tetap dihubungkan dengan perilaku korupsi tapi dengan target subjek etnis budaya lain selain yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah nilai budaya *siri'na pacce* dapat berlaku secara universal dalam menekan perilaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (1999). *Psikologi sosial* (Ed. revisi). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Alatas, S.H. (1983). *Sosiologi korupsi: Sebuah penjelajahan dengan data kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Barr, A & Serra, D. (2006). *Culture and corruption*. Laporan Penelitian, University of Oxford.
- Dayakisni, T., & Hudaniah. (2012). *Psikologi sosial* (Ed. revisi). Malang: UMM Press.
- Detiknews. *Ini dia peringkat provinsi terkorup di Indonesia versi fitra*. Detiknews (Online). Diakses 30 April 2015, dari <http://news.detik.com/read/2012/10/01/053204/2047460/10/ini-dia-peringkat-provinsi-terkorup-di-indonesia-versi-fitra?9911012>
- Fisman, R., & Miguel. E. (2007). Corruption, norms, and legal enforcement: Evidence from diplomatic parking tickets. *Journal of Political Economy*, 115, (6), 1020 – 1047.
- Hamid, A., Farid, Z. A., Mattulada., Lopa, B., & Salombe, C. (2007). *Siri' & pesse: Harga diri manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Kompas. *Empat sektor terkorup*. Kompas (Online). Diakses 30 April 2015, dari <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/19/02543722/empat.sektor.terkorup>
- Mashuri, M. F. (2015). *Nilai budaya siri'na pacce dengan komitmen perkawinan pada etnis Bugis-Makassar*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Murdoch, A. (2009). How much is there in corruption? Some thoughts on transformation-cum-collective culture shock in post-communist Poland. *Journal of Intercultural Management*, 1, (1), 42 – 63.
- Nida, R. (2011). *Korupsi + budaya = Indonesia* (Ed. kedelapan). Sosiologi Fisip, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, *Dialektika*, 8, 1 – 4.
- Putra, A. P. (2013). *Hubungan antara tipe kepribadian dengan problem solving appraisal dan cognitive appraisal pada narapidana korupsi*. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rachim, R. L. (2007). *Hubungan antara nilai budaya jawa dengan perilaku nakal pada remaja Jawa*. Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.

- Rosyidi, A. (2015). *Hubungan rasa malu-bersalah dengan sikap remaja mengenai perilaku korupsi*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Santosa, P. B. (2011). *Korupsi bangkrutkan nasionalisme*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Shen, C., & Wiliamson, J. B. (2005). Corruption, democracy, economic freedom, and state strength: A cross-national analysis. *Journal of Comparative Sociology*, 46, (4), 327 – 345.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumaryanto, A. D. (2007). *Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia (sebuah pendekatan dari aspek – aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi)*. Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999). Jakarta: Sekretariat Negara.
- VOA Indonesia. (2014). *Indonesia di peringkat 107 indeks persepsi korupsi*. Diakses 30 April 2015, dari <http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-peringkat-ke-107-indeks-persepsi-korupsi/2543860.html>
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan antikorupsi di sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yamamoto, K. (2000). Study on ethical concepts of the Japanese writer Yukio Mishima, ultra-nationalist. *Original Scientific Paper, Kyushu Institute of Design, Fukuoka, Japan*, 24,(2), 597 – 605.